

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PERALIHAN PENGELOLAAN TERMINAL TIPE-A DARI DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG KE KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT (Studi Pada Terminal Tipe A Arjosari Kota Malang)

Maria Margareta ^{1*}, Cahyo Sasmito ^{2*}, Asih Widi Lestari ^{*3}

Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang, Indonesia

*Corresponding Author:
Maria Margareta

Abstract.

Transportation is one of the accommodations in increasing the economic growth of a region, improving the quality of public transportation is also one of the efforts to create transportation with friendlier services to passengers that focuses on safety and reducing the use of private vehicles. One form of improving public transportation is good terminal management, therefore there is a view of terminal management as a form of improving the quality of terminals in providing services to passengers. This research itself uses a descriptive approach with qualitative methods with data management using technical triangulation and source triangulation. This research also uses George Edward III as a grand theoretical analysis. The results of this research show that the implementation of the transition policy for managing Type A terminals by the Department of Transportation to the Ministry of Transportation, Directorate of Land Transportation has generally gone well, although there are still various obstacles, such as the presence of brokers, and poor understanding of system management by the public. adequate but the reliability of the terminal apparatus/officers is able to maximize the implementation of this policy. Supporting and inhibiting factors in the implementation of the Type A terminal management transition policy by the Transportation Service to the Ministry of Transportation, Land Transportation Directorate. Supporting factors include: having sufficient human resources, good infrastructure, control, supervision, management and data collection running well.

Keywords: Policy Implementation & Terminal Management Transition

PENDAHULUAN

Untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas transportasi, Kementerian Perhubungan sebagai instansi pemerintah berperan aktif dalam memantau, mengendalikan dan mengevaluasi setiap kegiatan atau kegiatan yang berkaitan dengan transportasi guna meningkatkan efisiensi, kualitas dan Penjabaran terkait transportasi menjadi wewenang dan pengendalian langsung dari pemerintah pusat dan daerah melalui Dinas Perhubungan maupun Kementerian Perhubungan, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 tentang, penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan, menjelaskan bahwa tatanan transportasi baik udara, air dan darat wajib melalui pertimbangan kementerian perhubungan dengan mempertimbangkan prospek pengelolaan baik transportasi darat dengan menggunakan terminal, transportasi laut dengan menggunakan dermaga, maupun transportasi udara dengan menggunakan bandar udara, harus berdasarkan ketentuan Kementerian Perhubungan, (Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 24 Tahun 2024)

Lebih spesifik dalam pengelolaan terminal di Kota Malang, terminal di Kota Malang sendiri dibagi berdasarkan beberapa tipe, yakni Tipe A (Terminal Arjosari) Terminal Arjosari beralamat di Jalan Raden Intan No 1, Blimbing, Malang. Ini merupakan terminal bus terbesar dan

tersibuk di Malang Raya, karena dekat dengan permukiman penduduk dan sejumlah prasarana umum. Arjosari menjadi titik kumpul dan lintasan dari beberapa jenis moda angkutan umum. Seperti angkutan kota, angkutan pedesaan, MPU antar kota, bus wisata Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan angkutan antarkota.

Terminal Tipe B (Terminal Landungsari, dan Terminal Hamid Rusdi) Terminal tipe B melayani perjalanan menggunakan angkutankota, angkutan pedesaan, dan angkutan antarkota. Sedangkan Terminal Tipe C (Terminal). Terminal Tipe C (Terminal Madyopuro, Terminal Mulyorejo, Terminal Talangagung, Terminal Terminal Tumpang dan Terminal Dampit) terminal tipe C juga melayani transportasi antarkota dan antardesa. (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009)

Menurut UU No. 23 tahun 2014 tentang pembagian urusan pemerintah dalam hal perhubungan, disebutkan bahwa pengelolaan terminal tipe A dilakukan oleh Pemerintah Pusat, tipe B dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan tipe C dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Oleh Karena itu di Kota Malang, Terminal Arjosari yang merupakan Terminal Tipe A. Dikelola langsung oleh Kementerian Perhubungan. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014)

Pengalihan pengelolaan Terminal Tipe A, dari daerah kepusat disebabkan beberapa permasalahan yang umum terjadi pada Terminal Tipe-A di Indonesia. Karena menjadi terminal dengan intensitas masyarakat yang paling tinggi. Seperti (Kumuh dll). Di seluruh Indonesia permasalahan-permasalahan seperti kurang terawatnya terminal sehingga umumnya terminal Tipe A (terminal terpadat) memiliki citra “Kumuh, Kriminalitas dan Calo”, bisa lebih dikontrol dan diawasi dengan baik oleh pemerintah pusat secara langsung, selain itu peralihan pengelolaan Terminal Tipe A juga demi meningkatkan kenyamanan masyarakat yang mulai resah dengan tingka kecurangan yang sering terjadi di Terminal, sehingga pemerintah pusat berupaya agar Terminal nantinya tidak hanya sebagai tempat naik dan turun penumpang namun juga dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat sekitar. (Fauzi, 2017)

Tabel 1.
“After Before Pengelolaan Terminal Oleh Kemenhub”

Keterangan	Sebelum di Kelola Kemenhub	Setelah Dikelola Kemenhub
Ruang Pelayanan	 (Tanpa adanya tempat bermain anak)	 (Dilengkapi Tempat bermain anak)

Kursi Roda



(Masih versi lama)



(Sudah versi terbaru)

Taman Lalu Lintas



(Tidak Terawat)



(lebih tertata dan terawat)

Sumber: Data Sekunder, 2023

Berdasarkan hasil analisis dan penjabaran beberapa permasalahan diatas dalam menelaah terkait pengelolaan terminal dan kebijakan yang ada, maka peneliti tertarik mengangkat judul penelitian “Implementasi Kebijakan Tentang Peralihan Dari Dinas Perhubungan Kota Malang Ke Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat” untuk menjabarkan secara jelas bagai mana mekanisme peralihan pengelolaan terminal oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang berlangsung di Kota Malang.

METODE PENELITIAN

Dalam membahas terkait implementasi kebijakan tentang peralihan pengelolaan terminal Tipe A oleh Dinas Perhubungan Ke Kementrian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan darat menggunakan metode pendekatan deskriptif analisis dengan model penelitian kualitatif, selain itu pemilihan triangulasi Teknik juga menjadi unsur dalam memaksimalkan data penelitian berdasarkan topik yang dibahas. (Sugiyono, 2013)

Purposive sampling sebagai Teknik penentuan informan yang dipilih, dimana menentukan informan sesuai dengan pemahaman pada bidangnya masing-masing, sehingga informan yang dipilih oleh peneliti diantaranya adalah Kepala Dinas Perhubungan, Sekretaris Dinas Perhubungan, Kepala Terminal Tipe-A Arjosari Kota Malang, dan 2 Pegawai terminal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Tentang Peralihan Pengelolaan Terminal Tipe-A Dari Dinas Perhubungan Ke Kementrian Perhubungan Direktorat Perhubungan Darat

Dalam peralihan pengelolaan terminal Tipe-A dari dinas perhubungan Kota Malang ke Kementrian perhubungan darat Merujuk pada Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pengelolaan terminal Tipe-A semua diambil alih oleh pemerintah pusat dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal serta kenyamanan bagi pengguna jasa dalam hal ini masyarakat Kota Malang

Dalam mengimplementasi terkait Implementasi kebijakan tentang peralihan dari Dinas Perhubungan Kota Malang ke Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Model Implementasi yang paling cocok untuk menganalisis terkait kebijakan tersebut adalah model implementasi George C. Edward III. Model Implementasi Edward III dalam Agustino (2016:136-141) menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteoreman oleh Edward III,

terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut Edward III, tidak lain adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya, sangat penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten.

Selanjutnya Syarif (2014:147), juga berpendapat bahwa komunikasi sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan, syarif mengemukakan bahwa komunikasi bertujuan untuk mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam implementasi suatu kebijakan. Sehingga dalam melihat Implementasi kebijakan tentang peralihan dari Dinas Perhubungan Kota Malang ke Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Komunikasi diperlukan dalam memberikan informasi mengenai sistem peralihan dari Dinas Perhubungan Kota Malang ke Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Sehingga kebijakan tersebut dapat tepat sasaran, akurat dalam memaksimalkan pelayanan publik sektor perhubungan khususnya pada terminal Tipe-A Arjosari Kota Malang.

Selanjutnya menurut Edward III Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal paling penting dalam dalam mengimplementasikan kebijakan. Ini diperkuat dengan pendapat dari Farouk (2010:73) Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik. Bagi George C. Edward III, adalah disposisi. Disposisi atau 'sikap dari pelaksana kebijakan' adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Variabel keempat, menurut George C. Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur Birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi.

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi, oleh sebab itu struktur birokrasi menjadi suatu kajian kompleks dalam kajian keberhasilan proses Implementasi. Lebih jelasnya dalam Implementasi kebijakan tentang peralihan dari Dinas Perhubungan Kota Malang ke Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan menggunakan teori Edward III dijabarkan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi pada dasarnya dibutuhkan sebagai perantara informasi, dan pengembangan pola pikir. Menurut teori Cragan & Shields (1998) komunikasi merupakan hubungan di antara konsep teoretikal yang membantu memberi, secara keseluruhan ataupun sebagiannya, keterangan, penjelasan, penerangan, penilaian ataupun ramalan tindakan manusia berdasarkan komunikator (orang) berkomunikasi (bercakap, menulis, membaca, mendengar, menonton, dan sebagainya) untuk jangka masa tertentu melalui media.

Dalam merealisasikan terkait implementasi kebijakan peralihan terminal tipe A dari Dinas Perhubungan ke kementrian perhubungan darat bentuk komunikasi yang dilakukan dengan mengeluarkan undang-undang yakni UU nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Dalam pelaksanaannya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat tidak hanya sebatas intruksi langsung melalui Undang-undang yang dikeluarkan, bentuk komunikasi lain seperti evaluasi kinerja, dan pendataan mutu pelayanan juga merupakan salah satu bentuk penyesuaian komunikasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui kementerian perhubungan darat kepada Dinas Perhubungan Kota Malang.

Seperti yang disampaikan oleh Drs. Widjaja Saleh Putra selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, beliau mengatakan bahwa:

"...Dalam pelaksanaan sistem kebijakan khusus nya dalam peralihan pengelolaan terminal Tipe-A yakni arjosari yang dulu dikelola oleh kami (Dinas Perhubungan) dan sekarang dikelola oleh Kementerian perhubungan direktorat perhubungan darat, dilakukan berdasarkan pemberlakuan undang-undang nomor 12 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, disitu dikomunikasikan bahwa pengelolaan terminal utama itu langsung oleh kementerian untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengembangan mutu serta kenyamanan penumpang..." Hasil Wawancara 8 Oktober 2023

Hasil wawancara diatas dikemukakan bahwa bentuk komunikasi birokrasi dalam pengelolaan terminal Tipe-A didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan yang bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan terminal, serta peningkatan mutu terminal.

Selanjutnya dijelaskan juga oleh kepala pengelolaan teknologi informasi yakni bapak Imam Supriono, S.E berdasarkan hasil wawancara berikut:

"... Dalam melaksanakan pengelolaan terminal Tipe-A arjosari yang dikelola langsung oleh kementerian pusat, komunikasi yang dilakukan yakni dengan rapat evaluasi mingguan dan bulanan dimana dilihat grafik peningkatan atau penurunan dari pengunjung terminal, sehingga dapat dilihat faktor-faktor apa saja yang harus dibenahi dan diperbaiki, sedangkan bentuk pelaksanaan pengelolaan sistem kepada pengunjung, kami juga memberikan informasi baik melalui media sosial ataupun melalui banner yang ditempelkan pada area terminal, selain sebagai himbauan, juga sebagai pemberian arahan tata kelola terminal..." Hasil Wawancara 8 Oktober 2023

Wawancara diatas menjabarkan bahwa bentuk komunikasi yang dilakukan dalam hal memaksimalkan pengelolaan terminal yakni dilakukan dengan rutin diadakan rapat evaluasi mingguan dan bulanan untuk mengkaji data dan angka penumpang dan menganalisis setiap kendala yang ada dilapangan.

Pendapat selanjutnya juga disampaikan oleh sekretaris Dinas perhubungan Kota Malang dalam hal ini Bapak Ir. Slamet Santosa, S.T., M.T Berikut hasil wawancara bersama beliau:

"... komunikasi pelaksanaan sistem pengelolaan terminal tipe-A dari kami (dinas perhubungan) dan mereka (kementerian perhubungan darat) dilakukan dengan cara pemberian koordinasi lanjutan dimana pihak kementerian itu selalu berkoordinasi dengan kami untuk melihat seberapa jauh pola pengelolaan terminal kami (Tipe B dan C), itu juga bisa menjadi pertimbangan buat mereka dalam pengelolaan terminal Tipe-A..." Hasil Wawancara 9 Oktober 2023

Pendapat diatas dijelaskan bahwa dalam pengelolaan terminal tipe-A kementerian sebagai pengelola selalu berkoordinasi dengan dinas perhubungan untuk memastikan peningkatan mutu pelayanan terminal dimana dijadikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan sistem pengelolaan.

Selanjutnya dijelaskan pula oleh Bapak Nurhadi dan M. Syaiful selaku pegawai pada terminal Arjosari yakni pada bagian pelayanan. Berikut hasil wawancara bersama beliau:

"... kami selalu melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan maupun dengan masyarakat melalui sosialisasi pelayanan publik yang mencakup harga tiket, dan kendala-

kendala keberangkatan maupun pelaksanaan sistem penumpang lintas kabupaten/Kota...'
Hasil Wawancara 9 Oktober 2023, bersama Bapak Nurhadi

"... sosialisasi terkait tata kelola terminal Tipe-A baik dari pelayanan keselamatan, keamanan, keteraturan, kenyamanan, keterjangkauan, dan kesetaraan sering kami komunikasih baik melalui pamflete atau bener yan terpampang di lokasi Terminal Arjosari, selain itu juga, sosialisasi juga rutin kami lakukan..." Hasil Wawancara 9 Oktober 2023 bersama bapak M. Syaiful

Hasil wawancara bersama pegawai terminal tipe-A yang dikelola oleh Kemhub diatas dikemukakan bahwa bentuk komunikasi yang dilakukan diantaranya adalah melakukan sosialisasi pelayanan publik kepada masyarakat, baik melalui media sosial maupun melalui arahan benner dan pengumuman yang tersebar di beberapa pojok terminal Tipe-A Arjosari.

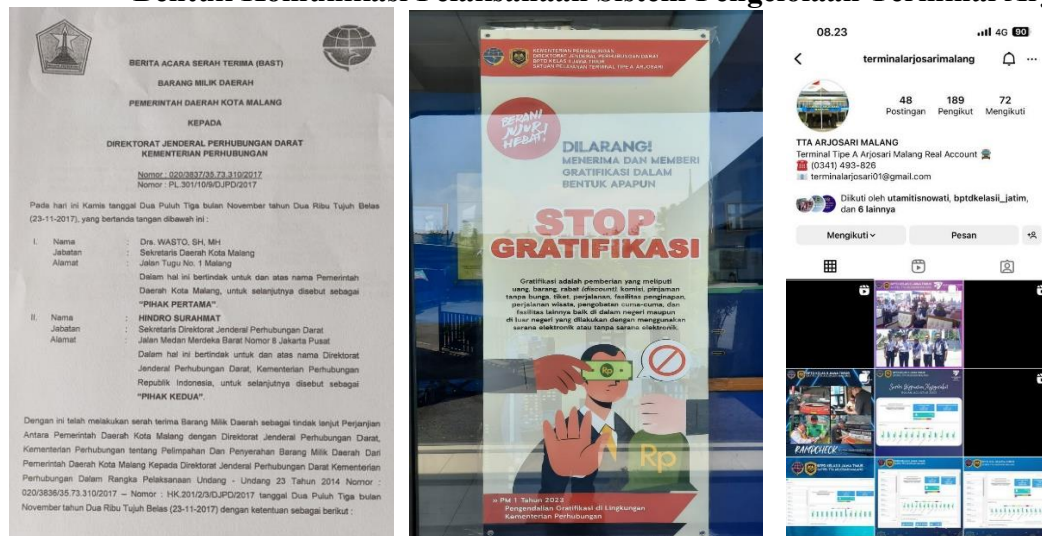
Selanjutnya pendapat yang sama disampaikan oleh Sartina sunarti dan Andika Permana selaku pengunjung dan pengguna terminal yang merupakan masyarakat Kota Malang, berikut hasil wawanncara bersama beliau:

"... Untuk informasih terkait terminal, mulai dari harga tiket hingga prosedur pelayanan bahkan pengaduan pengguna terminal itu kami tau melalui bener yang di tempelkan selain itu juga melalui berbagai sosial media, sehingga mudah unuk diakses..." Hasil Wawancara 11 Oktober 2023 bersama Bapak Swandika

"... Pemanfaatan media komunikasi berbasis teknologi seperti media sosial dalam membagikan kegiatan Terminal dalam pengembangan pelayanan publik memang sudah terlihat, jadi kami selalu memantau melalui sosial media apa saja kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Terminal Tipe-A Arjosari..." Hasil Wawancawa 11 Oktober 2023 bersama Ibu Sartina

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan pengelolaan terminal Tipe-A dalam hubungan nya dengan dinas Perhubungan Kota Malang, pada poin komunikasi dilaksanakan dengan beberapa cara yang pertama adanya rapat evaluasi kinerja mingguan dan bulanan sebagai bahan peninjauan aspek-aspek pendukung maupun penghambat dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat selain itu juga sosialisasi sebagai bentuk memaksimalkan setiap kebijakan yang dikeluarkan, kementrian perhubungan melalui pengelolaan terminal Tipe-A juga rutin berkoordinasi untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan terminal sehingga dapat meningkatkan mutu terminal, informasih terkait terminal Tipe-A Arjosari juga sering di bagikan melalui media sosial dan juga benner dan baliho-baliho disetiap sudut Terminal Arjosari.

Gambar 2
“Bentuk Komunikasi Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Terminal Arjosari”



Surat Putusan peralihan pengelolaan Terminal Tipe-A sebagai komunikasi langsung penyelenggaraan pengelolaan terminal oleh pemerintah daerah

Pemasangan baliho dan beberapa bener di setiap sudut terminal untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Arjosari

Pemanfaatan sosial media oleh Terminal Arjosari, dalam membagikan setiap rogram kebijakan dan kegiatan. Sehingga dapat diakses masyarakat

Data Sekunder, 2023

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, maka dapat disimpulkan dalam pengelolaan terminal tipe A oleh direktorat perhubungan darat kementerian perhubungan melakukan beberapa upaya dalam realisasi komunikasi birokrasi diantaranya adalah sosialisasi, rapat evaluasi, komunikasi satu arah melalui media sosial bener dan baliho, serta komunikasi publik melalui pemanfaatan sosial media.

2. Sumber Daya

Selain komunikasih, sumber daya juga menjadi aspek yang menjai tolak ukur keberhasilan implementasi kebijakan publik. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Dalam imlementasi sebuah kebijakan sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakkampuan pelaksanaan program pengelolaan terminal dapat disebabkan karena kurang memadai Sumber Daya yang ada, sehingga tidak memahami aspek yang di jalankan.

Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada sama halnya dalam merealisasikan pengelolaan terminal Tipe-A Arjosari Kota malang membutuhkan sumber daya dalam pelaksanaan nya. Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana sebuah program pemerintah dilakukan, kewenangan untuk

membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Dari segi Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

Dalam membahas terkait sumber daya dalam implementasi kebijakan peralihan pengelolaan terminal Tipe-A arjosari pada poin analisis Sumber Daya dijelaskan lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara bersama Drs. Widjaja Saleh Putra selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang:

“... Secara garis besar sumber daya dalam pengelolaan terminal sudah mumpuni baik dalam pelaksanaan sistem, maupun sarana dan prasarana penunjang nya, sehingga tinggal pola pengelolaan dan pemahaman pemanfaatan nya lagi yang perlu maksimalkan...” Hasil Wawancara 8 Oktober 2023

Penjabaran hasil wawancara diatas mengemukakan Sumber Daya yang dimiliki dalam pengelolaan Terminal Tipe-A Arjosari, Kota Malang dari berbagai aspek sudah sangat baik, Sumber daya aparatur ditinjau dari kualifikasi pekerja yang mumpuni dan sesuai dengan bidang kajian nya masing-masing. Sumber daya anggaran ditinjau dari realisasi program kerja yang dibuat, sedangkan sumber daya sarana yang juga memadai dibuktikan dengan tersedia nya fasilitas pelayanan kepada masyarakat yang baik.

Selanjutnya disampaikan pula oleh kepala pengelolaan teknologi informasi Terminal Tipe-A Arjosari yakni bapak Imam Supriono, S.E melalui hasil wawancara berikut:

“... kalau untuk sumber daya sangat baik, dimana semua pekerja yang ada di terminal tipe-A Arjosari melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP yang disepakati dan tentunya di terminal itu ada Punishment dan Reward bagi pegawai yang memiliki prestasi atau pegawai yang melanggar rule yang telah disepakati...” Hasil Wawancara 8 Oktober 2023

Berdasarkan hasil wawancara diatas dikemukakan bahwa kementerian perhubungan darat, melalui pengelolaan terminal tipeA Arjosari Kota Malang memiliki sumber daya aparatur yang baik, dimana kepegawaian nya memiliki sistem kontroling yang ketat dengan mekanisme Reward dan Punishment bagi pegawai yang memiliki prestasi dan yang melanggar rule yang telah ditetapkan.

Pendapat selanjutnya disampaikan oleh sekretaris Dinas perhubungan Kota Malang dalam hal ini Bapak Ir. Slamet Santosa, S.T., M. Disampaikan melalui hasil wawancara berikut:

“...soal sumber daya manusia sudah sangat baik mba, kami disini sudah sangat terlatih, bekerja sesuai dengan SOP yang ada seperti ketika ada pengaduan dari masyarakat mengenai kendala dalam pelayanan terminal dan masalah lain pihak kami langsung menuju ke mengevaluasi dan soal fasilitas sarana dan dan prasana kami disini sudah dilengkapi dengan fasilitas ramah disabilitas, jadi disabilitas memiliki prioritas khusus.... ” Hasil wawancara 9 Oktober 2023

Dari pernyataan Bapak Ir. Slamet Santosa, S.T., M diatas selaku sekretaris Dinas perhubungan Kota Malang maka dari segi SDM nya sudah sangat baik yang artinya komponen pendukung seperti keahlian dari para pelaksana, jumlah staff sudah di implementasikan dengan tujuan dalam pemenuhan program-program sehingga masalah mengenai pengelolaan terminal Tipe-A Arjosari bisa teratasi dengan baik.

Pendapat selanjutnya disampaikan oleh Bapak Nurhadi dan M. Syaiful selaku pegawai pada terminal Arjosari yakni pada bagian pelayanan, berikut hasil wawancara bersama beliau:

“... Sumber daya kami sangat memadai mulai dari toilet, rumah makan bagi pengunjung, tempat istirahat awak kendaraan, ruang laktasi, fasilitas ibadah dan beberapa sarana lainnya yang memang tersedia, sehingga pengunjung dan pengelola tinggal merawatnya agar terjaga...” Hasil Wawancara 11 Oktober 2023 bersama bapak Nurhadi

“... pada pengelolaan terminal, pelaksanaan sistem semuanya tersistem Sumber daya manusia mumpuni, sumber daya anggaran juga mencukupi, sedangkan sumber daya sarana dan prasarana juga memadai...” Hasil Wawancara 11 Oktober 2023 bersama bapak M. Syaiful

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapang dikemukakan bahwa Terminal Arjosari memiliki sumber daya aparatur yang baik dalam pelaksanaan sistem pengelolaan terminal, diantaranya Koordinator satuan pelayanan berjumlah 1 orang, PPNS berjumlah 1 orang, pengelola administrasi perkantoran berjumlah 2 orang, petugas teknologi informasi berjumlah 2 orang, petugas pelayanan berjumlah 2 orang, penguji kendaraan bermotor berjumlah 2 orang, pengatur lalu lintas berjumlah 10 orang, petugas pencatat kedatangan, keberangkatan, dan faktor muat berjumlah 6 orang, teknisi terminal berjumlah 7 orang, PPNPN berjumlah 7 orang. Sedangkan sumber daya anggaran juga cukup baik dibuktikan dengan realisasi program kerja karena pendanaan yang seimbang dari pemerintah pusat.

Selain itu di terminal arjosari juga memiliki sumber daya infrastruktur yang memadai dan ramah bagi disabilitas, karena ada prioritas yang diberikan, selain itu fasilitas keselamatan, kesejahteraan, ibadah, dan kebersihan juga memadai, selain itu fasilitas utama seperti jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, hingga tempat naik turun penumpang juga sangat memadai sehingga dalam pelaksanaan sistem pengelolaan khususnya dalam implementasi kebijakan pada poin sumber daya dapat dikatakan cukup baik.

Gambar 3

“Sarana dan Prasarana terminal”



Sumber: Data Sekunder, 2023

Sumber: Data Sekunder, 2023

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan dalam mengkaji implementasi kebijakan peralihan pengelolaan terminal Tipe-A dari Dinas Perhubungan Kota Malang ke Direktorat Jenderal Perhubungan Kementerian Perhubungan Darat. Maka secara garis besar maka dari segi SDM nya sudah sangat baik yang artinya komponen pendukung seperti keahlian dari para pelaksana, jumlah staff sudah di implementasikan dengan tujuan dalam pemenuhan program-program sehingga masalah mengenai pengelolaan terminal Tipe-A Arjosari bisa teratasi dengan baik.

3. Disposisi

Disposisi ialah suatu keinginan, sutau kemauan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan serta mewujudkan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh. Maka disposisi sangat berkaitan erat dengan kebijakan pejabat, oleh karena itu kebijakan akan berhasil

di implementasi dengan baik apabila dibantu oleh aparat pelaksana perilaku positif aparat dapat menunjang keberhasilan implementasi yang efektif.

Kota Malang telah menunjukkan kesungguhan yang baik dalam merealisasikan setiap kebijakan peralihan pengelolaan Terminal Tipe-A, meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti adanya calo dan lain-lain disekitaran terminal. Kesiapan dan komitmen dari penyelenggara pengelolaan terminal Tipe-A oleh Direktorat Jendral Perhubungan dapat dilihat sebagai berikut: Pertama, kesiapan kementerian perhubungan darat dalam melaksanakan tugas yaitu menyelenggarakan proses kebijakan pengelolaan terminal Tipe-A Arjosari menggunakan sistem tertentu, melaksanakan pengelolaan terminal Tipe-A Arjosari dengan metode tertentu, serta tetap mengedepankan aspek pelayanan yang baik bagi semua kalangan masyarakat, kehati-hatian atau ketelitian dan tanggung jawab secara administratif terhadap semua hal yang dikerjakan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan adanya disposisi dari para implementor. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Namun demikian, ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan akan menjadi tidak efektif. Jadi disposisi implementor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan.

Disposisi atau dapat dikatakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Implementasi kebijakan agar berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Jadi disposisi penekanannya lebih pada sikap yaitu : tanggung jawab, motivasi dan komitmen terhadap pekerjaan.

Lebih lanjut berikut dijelaskan oleh Drs. Widjaja Saleh Putra selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, berikut hasil wawancara bersama beliau:

“... kami selalu menyesuaikan sama kebijakan pusat dalam pengelolaan sistem terminal, mulai dari tata kelola n ya, model pelayanan hingga pada program kerja yang diajukan semua kami menyesuaikan sam program pemerintah pusat yang dimana semua da pada peraturan pemerintah nya...” Hasil Wawancara 8 Oktober 2023

Wawancara bersama kepala dinas diatas perhubungan diatas dikemukakan bahwa dinas perhubungan Kota Malang dalam merealisasikan pengelolaan terminal selalu mengacu pada peraturan pemerintah maupun undang-undang yang ada sehingga sikap kebijakan yang dikeluarkan pun disesuaikan sama peraturan pusat

Pendapat selanjutnya disampaikan pula oleh kepala pengelolaan teknologi informasi Terminal Tipe-A Arjosari yakni bapak Imam Supriono, S.E, berikut hasil wawancara bersama beliau:

“...Secara garis besar kami sebagai tangan kanan dari kementerian perhubungan darat dalam pengelolaan terminal tipe-A Arjosari mengikuti rule yang telah ditetapkan kementerian, sehingga kami hanya mengikuti arahan yang diberikan...” Hasil Wawancara 9 Oktober 2023

Wawancara dengan Bapak Imam Supriono diatas dikemukakan bahwa pengelolaan terminal Tipe-A mengutamakan arahan dari kementerian perhubungan darat, sehingga setiap kebijakan bahkan program kerja yang dikeluarkan pula mengikuti dari kementerian.

Selanjutnya disampaikan pula oleh sekretaris Dinas perhubungan Kota Malang dalam hal ini Bapak Ir. Slamet Santosa, S.T., M. Berikut hasil wawancara bersama beliau:

“... kalau dari kami sebagai bagian dari pengelolaan terminal melakukan pengawasan, kontroling dan pengkoordinasian pelayanan terminal, serta selalu melaksanakan pengelolaan, penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan yang ada di terminal...” Hasil Wawancara 9 Oktober 2023

Bentuk kewenangan pemerintah dalam pengelolaan terminal melakukan berbagai upaya diantaranya melaksanakan pengawasan, pengandilan dan juga pengkoordinasian pelayanan terminal, juga melakukan pengelolaan, penyelenggaraan dan pengaeasan terminal kepada pihak-pihak terkait.

Selanjutnya juga disampaikan oleh Bapak Nurhadi dan M. Syaiful selaku pegawai pada terminal Arjosari yakni pada bagian pelayanan berikut hasil wawancara bersama beliau:

“...Bentuk disposisi dari kami yakni melaksanakan setiap system pengelolaan terminal sebagaimana mestinya. Seperti melaksanakan koordinasi secara rutin Bersama dengan jajaran pegawai untuk mengetahui hambatan dan mencari solusi terkait dengan hambatan tersebut dalam bekerja setiap hari di terminal Tipe-A...” Hasil Wawancara 9 Oktober 2023, bersama Bapak Nurhaidi

“... Kami melakukan pemukhtahiran data operational pelyanan terminal juga mencatat secara rinci waktu kedatangan dann keberangkatan, serta selalu Menyusun laporan rekapitulasi data kedatangan dan nkeberangkatan secara berkala...” Hasil Wawancara 9 Oktober 2023 bersama Bapak M. Syaiful

Hasil observasi yang dilakukan peneliti terkait disposisi atau kemauan dan kecendrungan pemangku kebijakan terhadap pelaksanaan pengelolaan. Kesediaan dan komitmen dari penyelenggara pengelolaan terminal oleh kementerian perhubungan darat Tipe-A dapat dilihat sebagai berikut: Pertama, kesiapan aparatur pelaksanaan terminal tipe A dalam melaksanakan tugas yaitu menyelenggarakan proses pelayanan terminal tipe A, seperti pengelolaan, koordinasi, pengawasan, dan kontroling dengan sistem tertentu berdasarkan hasil kesepakatan bersama, melaksanakan perencanaan teknis terkait dengan peraturan lalu lintas di area pintu keluar bus dan di area depan terminal Tipe A Arjosari Malang, serta tetap mengedepankan aspek publik dalam pemberian pelayanan sistem yang baik bagi semua kalangan masyarakat, kehati-hatian atau ketelitian dan tanggung jawab secara administratif terhadap semua hal yang dikerjakan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu terminal tipe A Arjosari juga berperan dalam mengawasi dan mengatur serta mengarahkan angkutan zona kedatangan dan keberangkatan, agar pengaturan lalu lintas di dalam dan di luar terminal dapat berjalan dengan baik.

Gambar 4

“Koordinasi antara pengelola terminal tipe-A Arjosari”



Koordinasi antara pengelolaan terminal dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan public antar anggota lembaga pengelolaan terminal sebagai bentuk kewenangan dan keberpihakan dalam hal mengoptimalkan pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara dan Observasi, dan dokumentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa para pegawai mampu bersikap disiplin pada saat jam kerja sudah siap di tempat. Selain itu juga pegawai menyadari bahwa seseorang yang bekerja di bidang Pelayanan Publik harus memberikan sebaik mungkin, dan memberi kepuasan kepada Masyarakat pengguna jasa. Komitmen tersebut dibuktikan kesadaran yang tinggi dari para pegawai untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat. Kesediaan dan komitmen dari penyelenggara pengelolaan terminal Arjosari dapat dilihat dalam memaksimalkan pelayanan publik dapat dilihat dengan adanya program-program komtroling, pengawasan dan koordinasi peningkatan mutu layanan yang dilakukan secara intens, menjadikan pengelolaan terminal secara pasti melaksanakan implementasi kebijakan peralihan pengelolaan terminal dengan baik. sehingga secara besar disposisi atau kewenangan pemerintah dalam mengelola terminal dapat dikatakan berjalan dengan baik, karena mampu memaksimalkan kualitas pelayanan publik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dan aspek yang penting dari setiap organisasi adalah adanya koordinasi yang baik antar departemen. koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur – unsur manajemen dan pekerjaan – pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam kata lain koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan – tujuan dan kegiatan – kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen – departemen atau bidang – bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

Koordinasi merupakan suatu proses rangkaian kegiatan dalam rangka pengintegrasian dan penyelarasan tujuan dan rencana kerja yang telah ditetapkan pada semua unsur, bidang fungsional dan departemen untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis secara efektif dan efisien. Dalam sebuah organisasi koordinasi harus diberikan oleh atasan dalam menyelesaikan tugas sehingga penyampaian informasi menjadi jelas dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan.

Birokrasi dijadikan sebagai sebuah instrument dalam menangani keperluan-keperluan publik. Seperti halnya Dinshub dan Kemenhub dalam melaksanakan implementasi kebijakan pengelolaan terminal sebagai bentuk instrument terhadap keperluan-keperluan publik dan respon terhadap permasalahan kesejahteraan sosial, kebijakan pengelolaan terminal menjadi sebuah alternative Negara dalam membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Struktur organisasi birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi birokrasi ini melingkupi dua hal, yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP) SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Berikut hasil wawancara bersama dengan Drs. Widjaja Saleh Putra selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, berikut hasil wawancara Bersama beliau:

“...Hubungan dinas-dinas terkait yang ikut partisipasi menimplementasikan mengenai pengelolaan terminal Tipe-A ini dinas perhubungan sebagai penggerak utama dan ada pegawai terminal Tipe-A Arjosari eksekutor jadi kalau ditanya bagaimana hubungan struktur birokrasi kami terus membangun pola komunikasi yang baik antara internal kami sendiri dan Kemnhub...dan bukan hanya dari kami mba kami juga tentunya membutuhkan dukungan dari Masyarakat untuk sama sama merealisasikan permasalahan terkait oengelolaan terminal...” Hasil wawancara 19 Oktober 2023

Hasil wawancara diatas terkait implementasi kebijakan peralihan pengelolaan terminal oleh dinas perhubungan ke kementerian perhubungan diektorat perhubungan darat, dapat dikatakan bahwa sudah terjalin koordinasi dan kerja sama yang baik di tiap unsur, baik dari Pemerintah

daerah antara dinas perhubungan dan kementerian perhubungan direktorat perhubungan darat. Setiap unsur tersebut sudah saling berkoordinasi dan menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dengan baik sehingga tidak ada kendala dalam melakukan pengelolaan terminal Arjosari hanya saja perlu adanya kerjasama yang baik dari segi masyarakat.

Dalam membahas struktur biokrasi pelaksanaan system pengelolaan Terimal Tipe-A Arjosari, dijelaskan lebih lanjut oleh kepala pengelolaan teknologi informasi Teminal Tipe-A Arjosari yakni bapak Imam Supriono, S.E, berikut hasil wawancara Bersama beliau:

“... kalau mengenai struktur birokrasi mba, kami disini jelas bekerja berdasarkan komando dari atasan dan bekerja sesuai dengan bidang masing-masing, kalau saya kan dibidang kepala pengelolaan teknologi informasi terminal Arjosari jadi kami juga punya atasan mas, sedangkan kerja sama kami jelas bekerja sama dengan dinas perhubungan maupun kementerian perhubungan misalnya meningkatkan informasi dan kreatifitas penyapaian informasi kepada pengguna jasa yang membutuhkan informasi terkait operational Terminal Tipe-A” Hasil wawancara 19 Oktober 2023

Berdasarkan hasil wawancara diatas dikemukakan bahwa birokrasi pelaksanaan sistem implementasi kebijakan peralihan pengelolaan terminal oleh dinas perhubungan ke kementerian perhubungan diektorat perhubungan darat, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan kebijakan yang berlaku, sehingga lebih terstruktur dan terarah. Pelaksanaan sistem implementasi kebijakan peralihan pengelolaan terminal oleh dinas perhubungan ke kementerian perhubungan diektorat perhubungan darat disesuaikan juga dengan SOP yang diterapkan sehingga, birokrasi pelaksanaan sistem kebijakan pengelolaan terminal memiliki konsep yang signifikan dengan kajian deskriptif terhadap tupoksi yang telah ditetapkan bersama.

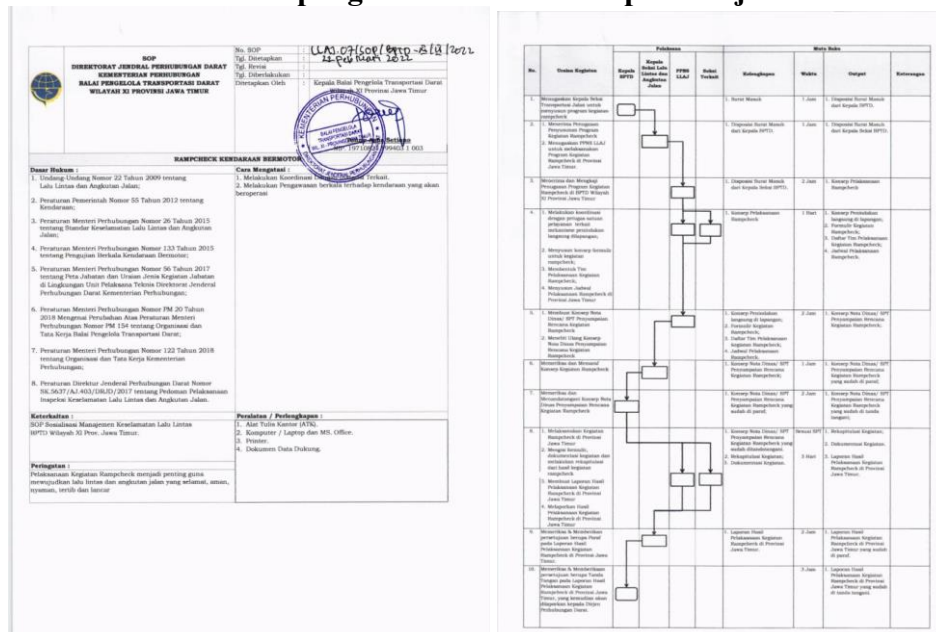
Selanjutnya dijelaskan pula oleh Bapak Nurhadi dan M. Syaiful selaku pegawai pada terminal Arjosari yakni pada bagian pelayanan. Berikut hasil wawancara Bersama dengan beliau:

“... Dalam melaksanakan sistem birokrasi pengelolaan terminal Arjosari, semua berdasarkan rule dan tupoksi yang dispesifikasikan, selain itu koordinasi antar Lembaga juga sering dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ” Hasil wawancara 9 Oktober 2023 bersama bapak Nurhadi

“... Pelaksanaan sistem birokrasi di terminal Tipe-A Arjosari berdasarkan ketentuan perda, maupun perpu yang berlaku, selain itu birokrasi terminal Tipe-A juga melaksanakan beberapa fungsi diantaranya yakni melaksanakan inventarisasi terkait dengan asset dan fasilitas terminal Tipe-A Arjosai yang perlu perbaikan atau revitalisasi dan melaporkan kepada pemimpin...” Hasil Wawancara 9 Oktober 2023 bersama Bapak M. Syaiful

Hasil observasi yang dilakukan oleh penelitian lapangan birokrasi pelaksanaan sistem implementasi kebijakan peralihan pengelolaan terminal oleh dinas perhubungan ke kementerian perhubungan diektorat perhubungan darat, semua nya disesuaikan pada peraturan yang berlaku serta SOP pelaksanaan yang ada. Adapun SOP pengelolaan terminal Tipe-A Arjosari yakni dijelaskan berdasarkan gambar sebagai berikut:

Gambar 5
“SOP Pelaksanaan sistem pengelolaan terminal Tipe-A Arjosari Kota Malang”



Sumber; Data Sekunder, 2023

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi peneliti dilapangan, maka struktur birokrasi dari pengelolaan terminal Tipe-A oleh Dinshub ke Kemenhub, sudah sangat kompleks dimana dibentuk Unipet pelayanan teknis, dan Kasubag-kasubag dalam rangka pengelolaan terminal Tipe-A Arjosari, selain itu koordinasi antar implementor kebijakan melalui rapat evaluasi rutin yang diadakan setiap sebulan sekali, menjadikan struktur birokrasi berada pada tupoksi masing-masing dan tidak keluar dari jabatan yang telah diamanahkan, selain itu struktur birokrasi dalam hal Standar Operasional Prosedur (SOP) di Dinshub dan Kemenhub dan Satpol, dalam menjalankan fungsi pengelolaan terminal Tipe-A sudah melakukan penyesuaian dan pelaksanaan dengan sebaik mungkin.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

a. Faktor Pendukung

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut. Dalam mengimplementasi kebijakan penelolan terminal Tipe-A Ajosari Kota Malang tentunya memiliki faktor dukungan, Faktor Pendukung adalah faktor yang mendukung, mengajak dan bersifat untuk ikut serta dalam dukungan suatu kegiatan.

Analisis terhadap faktor pendukung saat ini dari pengelolaan terminal Tipe-A oleh Kemenhub Bersama tim satuan kerja Terminal Tipe-A Arjosari Kota Malang adalah mempunyai SDM yang cukup, memiliki sarana prasarana dan fasilitas yang cukup menjadi pendukung utama dalam merealisasikan kebijakan program.

Maka secara runtut bahwa dalam terminal Tipe-A Arjosari Kota Malang kesiapan system pengelolaan dan juga sarana prasarana yang memadai dan juga kesiapan aparatur pemerintah serta koordinasi biroktasi menjadi faktor yang menjadi penunjang keberhasilan implementasi kebijakan ini, selain itu koordinasi birokrasi juga dengan kesiapan system pelaksanaan pengelolaan terminal mejadi hal pendukung.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dapat dikatakan sebagai segala sesuatu hal yang memiliki sifat menghambat atau bahkan menghalangi atau menahan terjadinya suatu kebijakan, sehingga dalam implementasi kebijakan tentang peralihan dari Dinas Perhubungan Kota Malang ke Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, ada beberapa faktor penghambat implementasi kebijakan tersebut diantaranya adalah seperti pemahaman Masyarakat terhadap system yang telah dikeluarkan masih relative rendah, sehingga kurang maksimalnya keterlaksanaan system yang ada.

Oleh sebab itu hasil analisis terhadap kendala keterlaksanaan sistem kebijakan pengelolaan terminal tipe-A adalah bahwa respon dari Masyarakat sangat dibutuhkan saat ini untuk sama sama bersinergi mengimplemntasikan tujuan program ini, selain itu juga kesinambungan antar program juga menjadi salah satu penghambat dalam mengimplementasi kebijakan terkait, banyak nya oknum-oknum yang memanfaatkan system dengan menyediakan berbagai calo-calo juga menjadi salah satu faktor yang menghambat keterlaksanaan system pengelolaan yang ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi kebijakan peralihan pengelolaan terminal Tipe A oleh Dinas Perhubungan Ke Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Darat secara garis besar sudah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat berbagai kendala, seperti adanya calo, dan pemahaman terhadap pengelolaan system oleh Masyarakat yang belum memadai namun keandalan aparatur/petugas terminal mampu memaksimalkan implementasi kebijakan tersebut.

Faktor pendukung dan penghambat dari Implementasi kebijakan peralihan pengelolaan terminal Tipe A oleh Dinas Perhubungan Ke Kementerian Perhubungan Direktorat Perhubungan Darat Faktor pendukung diantaranya: mempunyai SDM yang cukup, fasilitas sarana prasarana yang baik, adanya kontroling, pengawasan, pengelolaan dan pendataan berjalan dengan baik. Faktor penghambatnya diantaranya: adaptasi Masyarakat terhadap system, dan pemahaman Masyarakat yang masih kurang sehingga kurang memanfaatkan fasilitas terminal sebagai mana mestinya, selain itu juga, banyaknya individu/oknum yang mencari keuntungan pribadi dengan menjadi calo dan juga pungutan liar menjadi

REFERENSI

- Fauzi, FZ. 2017. *Konflik Ekonomi Dalam Tata Kelola Pemerintah*. Jurnal Ilmu Sosial. Surabaya: Unair. Volume 3 No.2. Diakses Tanggal 8 Agustus 2023
- Sugiyono. 2017. *Metode penelitian kuantitatif,kualitatif dan R&D.n Bandung: Alfabeta*
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Dalam Trayek
- Peraturan Mentri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 24 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan